LAMPIRAN I
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

TABEL PARAMETER ANALISIS RISIKO KETIDAKTERTAGIHAN PIUTANG PAJAK

PARAMETER	BOBOT	TINGKAT RISIKO KETIDAKTERTAGIHAN		
		Rendah	**Sedang**	**Tinggi**
		100	**50**	**10**
Karakteristik Piutang	**30%**			
Umur Piutang	30%	< 1 tahun	1 - 3 tahun	> 3 tahun
Peringkat Nilai Piutang Wajib Pajak di KPP	30%	50% peringkat teratas	40% peringkat berikutnya	10% peringkat terbawah
Kualitas piutang (sesuai PER-02/PJ/2012)	40%	Lancar	Kurang Lancar	- Diragukan - Macet
Tingkat Ketertagihan	**30%**			
Riwayat Pelaporan	20%	Wajib Pajak selalu melaporkan SPT Tahunan PPh Badan/PPh OP (untuk WP domisili) dalam dua tahun terakhir.	Wajib Pajak pernah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan/PPh OP/SPT Masa PPN (untuk WP domisili) dalam dua tahun terakhir.	Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan/PPh OP/SPT Masa PPN (untuk WP domisili) dalam dua tahun terakhir.
		Wajib Pajak selalu melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 23/Pasal 4 ayat (2) (untuk WP lokasi) dalam dua tahun terakhir.	Wajib Pajak pernah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 23/Pasal 4 ayat (2) (untuk WP lokasi) dalam dua tahun terakhir.	Wajib Pajak tidak melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 23/Pasal 4 ayat (2) (untuk WP lokasi) dalam dua tahun terakhir.
Riwayat Pembayaran	20%	Terdapat pembayaran pajak dalam dua tahun berturut-turut.	Terdapat pembayaran pajak dalam dua tahun terakhir.	Tidak terdapat pembayaran pajak dalam dua tahun terakhir.
Riwayat Pemeriksaan	15%	Wajib Pajak diperiksa dalam dua tahun berturut-turut.	Wajib Pajak pernah diperiksa dalam dua tahun terakhir.	Wajib Pajak tidak pernah diperiksa dalam dua tahun terakhir.
Kondisi Usaha Wajib Pajak	25%	Wajib Pajak beroperasi normal	Wajib Pajak tidak beroperasi normal atau dalam sengketa (permohonan pailit/PKPU, dan lain-lain)	Wajib Pajak Pailit WP OP sudah meninggal dunia Wajib Pajak Dalam Likuidasi
Status/Kondisi Penanggung Pajak	20%	Mudah	Sedang	Sulit
Kemampuan Membayar	**40%**			
Keberadaan dan nilai aset Wajib Pajak	50%	Ada; Nilai aset >= nilai piutang	Ada; Nilai aset < nilai piutang	Tidak Ada
Keberadaan dan nilai aset Penanggung Pajak	50%	Ada; Nilai aset >= nilai piutang	Ada; Nilai aset < nilai piutang	Tidak Ada

PETUNJUK PENGISIAN
TABEL ANALISIS RISIKO KETIDAKTERTAGIHAN PIUTANG PAJAK

PARAMETER	PETUNJUK PENGISIAN
Umur Piutang	Diisi sesuai umur piutang (kohir) yang terbit terakhir di antara keseluruhan piutang yang dimiliki satu Wajib Pajak. **<u>Untuk SKP Tahun Pajak 2008 ke atas</u>** disetujui Wajib Pajak : Dihitung Sejak Terbit SKP. Tidak Disetujui Wajib Pajak : Dihitung sejak memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). **<u>Untuk SKP Tahun Pajak 2007 ke bawah</u>** Sejak Terbit SKP. Contoh : Wajib Pajak PT JKL memiliki utang pajak sebagai berikut : - SKPKB PPh Badan Rp 2.000.000.000,00 (umur piutang 2 tahun) - SKPKB PPN Rp 350.000.000,00 (umur piutang < 1 tahun) - STP PPN Rp 80.000.000,00 (umur piutang > 3 tahun) Maka, umur piutang pajak WP PT JKL yang dimasukkan dalam analisis risiko adalah <1 tahun.
Peringkat Nilai Piutang Wajib Pajak di KPP	Keseluruhan piutang (kohir) di KPP dibuatkan peringkat dengan mengurutkan berdasarkan nominal piutang terbesar hingga terkecil. Kemudian dibagi menjadi tiga kelompok : 50% peringkat teratas = masuk dalam kategori risiko rendah (prioritas I) 40% peringkat berikutnya= masuk dalam kategori risiko sedang (prioritas II) 10% peringkat terbawah = masuk dalam kategori risiko tinggi (prioritas III) Dalam hal Wajib Pajak yang dianalisis memiliki lebih dari satu kohir dan termasuk ke dalam kelompok yang berbeda, maka peringkat nilai piutang Wajib Pajak mengikuti peringkat kohir tertinggi atas nama Wajib Pajak tersebut. Contoh : Wajib Pajak A memiliki utang pajak sebagai berikut : - SKPKB PPh Badan Rp 1.000.000.000,00, yang setelah diurutkan dengan seluruh kohir di KPP termasuk dalam kelompok 50% peringkat teratas. - SKPKB PPN Rp 180.000.000,00 (termasuk 40% peringkat berikutnya) - STP PPN Rp 90.000.000,00 (termasuk 10% peringkat terbawah) Maka, dalam analisis risiko, Wajib Pajak termasuk dalam kategori 50% peringkat teratas.
Kualitas Piutang (sesuai PER-02/PJ/2012	Diisi sesuai kualitas piutang dengan nominal paling dominan di antara keseluruhan piutang yang dimiliki satu Wajib Pajak. Kualitas piutang yang dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-02/PJ/2012 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak. Contoh : Wajib Pajak B memiliki utang pajak sebagai berikut : - SKPKB PPh Badan Rp 600.000.000,00 (kualitas piutang kurang lancar). - SKPKB PPh Badan Rp 180.000.000,00 (kualitas piutang lancar). - SKPKB PPN Rp 520.000.000,00 (kualitas piutang lancar) - STP PPh Badan Rp 50.000.000,00 (kualitas piutang diragukan) - STP PPh Badan Rp 25.000.000,00 (kualitas piutang diragukan) - STP PPN Rp 90.000.000,00 (kualitas piutang diragukan) Maka, kualitas piutang Wajib Pajak yang dimasukkan dalam analisis risiko adalah : lancar (Rp 180 juta + Rp 520 juta = Rp 700 juta).
Riwayat Pelaporan	Diisi salah satu saja (untuk Wajib Pajak domisili atau Wajib Pajak lokasi).
Riwayat Pembayaran	Yang dimaksud dengan pembayaran pajak mencakup pembayaran atas segala jenis pajak yang dilakukan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
Riwayat Pemeriksaan	Pemeriksaan yang dimaksud mencakup pemeriksaan rutin maupun tujuan lain dan atas segala jenis pajak
Kondisi Usaha Wajib Pajak	Diisi sesuai kondisi kelangsungan usaha Wajib Pajak berdasarkan fakta terakhir yang diperoleh dengan klasifikasi berikut : - Beroperasi normal = Tidak terdapat sengketa menyangkut status kelangsungan usaha Wajib Pajak, dan Wajib Pajak tidak menunjukkan tanda-tanda pailit. - Wajib Pajak tidak beroperasi normal/dalam sengketa = Terdapat sengketa menyangkut status kelangsungan usaha Wajib Pajak (terdapat pengajuan permohonan pailit/penundaan kewajiban pembayaran utang atas nama Wajib Pajak). - Wajib Pajak Pailit = Wajib Pajak telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan dan proses pengurusan harta pailit oleh Kurator sedang berlangsung. - Wajib Pajak Dalam Likuidasi = Wajib Pajak telah dinyatakan bubar (telah terjadi pembubaran perseroan) dan proses likuidasi sedang berlangsung.

Status/Kondisi Penanggung Pajak	Diisi dengan penilaian subyektif Jurusita Pajak/Kepala Seksi Penagihan terhadap faktor kualitatif yang melekat pada status dan atau kondisi Penanggung Pajak. Penilaian subyektif dimaksud dapat berupa namun tidak terbatas pada hal-hal di bawah ini : - Mudah : Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap cukup kooperatif terhadap upaya-upaya persuasif Jurusita dan menunjukkan itikad baik, responsif terhadap tindakan penagihan aktif, Penanggung Pajak relatif mudah dihubungi dan diketahui keadaannya. - Sedang : Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap kurang kooperatif, tidak responsif terhadap penagihan aktif, Penanggung Pajak diketahui keberadaannya namun sulit dihubungi. - Sulit : Apabila Wajib Pajak/Penanggung Pajak bersikap tidak kooperatif dan tidak menunjukkan itikad baik, memberikan respon negatif terhadap penagihan aktif, Penanggung Pajak tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya.
Keberadaan dan Nilai Aset Wajib Pajak	Diisi dengan status keberadaan aset Wajib Pajak yang dapat dijadikan obyek sita, dan perbandingan antara nilai aset tersebut dengan total nilai piutang atas nama Wajib Pajak.
Keberadaan dan Nilai Aset Penanggung Pajak	Diisi dengan status keberadaan aset Penanggung Pajak yang dapat dijadikan obyek sita, dan perbandingan antara nilai aset tersebut dengan total nilai piutang atas nama Wajib Pajak

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

LAMPIRAN II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KERTAS KERJA ANALISIS RISIKO KETIDAKTERTAGIHAN PIUTANG PAJAK

Nama Wajib Pajak : .....
NPWP : .....
Nilai Piutang Pajak : .....
Per Tanggal : .....

PARAMETER	BOBOT	TINGKAT RISIKO KETIDAKTERTAGIHAN							
		PERIODE I				PERIODE II			
		Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah Skor	Rendah	Sedang	Tinggi	Jumlah Skor
		100	50	10		100	50	10	
Karakteristik Piutang	**30%**	**30**	**15**	**3**		**30**	**15**	**3**	
Umur Piutang	30%	9	4.5	0.9		9	4.5	0.9	
Peringkat Nilai Piutang Wajib Pajak di KPP	30%	9	4.5	0.9		9	4.5	0.9	
Kualitas piutang (sesuai PER-02/PJ/2012)	40%	12	6	1.2		12	6	1.2	
Skor Karakteristik Piutang									
Tingkat Ketertagihan	**30%**	**30**	**15**	**3**		**30**	**15**	**3**	
Riwayat Pelaporan	20%	6	3	0.6		6	3	0.6	
Riwayat Pembayaran	20%	6	3	0.6		6	3	0.6	
Riwayat Pemeriksaan	15%	4.5	2.25	0.45		4.5	2.25	0.45	
Kondisi Usaha Wajib Pajak	25%	7.5	3.75	0.75		7.5	3.75	0.75	
Status/Kondisi Penanggung Pajak	20%	6	3	0.6		6	3	0.6	
Skor Tingkat Ketertagihan									
Kemampuan Membayar	**40%**	**40**	**20**	**4**		**40**	**20**	**4**	
Keberadaan dan nilai aset Wajib Pajak	50%	20	10	2		20	10	2	
Keberadaan dan nilai aset Penanggung Pajak	50%	20	10	2		20	10	2	
Skor Kemampuan Membayar									
Total Skor									
Piutang akan jatuh tempo dalam tahun berjalan									Ada / Tidak Ada

	Dibuat oleh Jurusita Pajak			Ditelaah oleh Kepala Seksi Penagihan		
	Nama	Paraf	Tanggal	Nama	Paraf	Tanggal
Periode I						
Periode II						

Periode	Total Skor	Tingkat Risiko	Prioritas
I			
II			

LAMPIRAN III
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP ..... 1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

DAFTAR PRIORITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
PER TANGGAL .....3)

No. Urut	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Skor	Prioritas	Daluwarsa di Tahun Berjalan (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
....						
98						
99						
100						

....., ...
Kepala Seksi Penagihan

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
3)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Diisi dengan urutan prioritas tindakan penagihan pajak
Kolom 2	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang termasuk 100 WP yang memiliki utang pajak terbesar KPP
Kolom 3	:	Cukup jelas
Kolom 4	:	Diisi dengan nilai piutang pajak
Kolom 5	:	Diisi dengan total skor berdasarkan Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak (KKARKPP)
Kolom 6	:	Diisi dengan kelompok Wajib Pajak berdasarkan prioritas (I / II / III)
Kolom 7	:	Diisi dengan keterangan apakah terdapat piutang pajak yang akan daluwarsa di tahun berjalan (ya / tidak)

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

LAMPIRAN IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

PROGNOSIS PENCAIRAN PIUTANG PAJAK
TAHUN 2012

Kode KPP	Nama KPP	Target Pencairan Per KPP	Pencairan Piutang Bulan Januari s.d. Maret 2012	Prognosa											Total	Keterangan
				Nama Wajib Pajak	NPWP/NOP	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. Wajib Pajak Penunggak Pajak 100 Besar																
B. Selain Wajib Pajak/Penunggak Pajak 100 Besar																
Jumlah																

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian

Kolom yang diblok	:	Tidak diisi
1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Diisi dengan target pencairan piutang masing-masing KPP
Kolom 4		
Poin A	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak bulan Januari s.d. Maret 2012 dari Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan dan WP tersebut merupakan Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Poin B	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak bulan Januari s.d. Maret 2012 dari Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan tetapi WP tersebut tidak termasuk Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Kolom 5		
Poin A	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan dan WP tersebut merupakan Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Poin B	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan tetapi WP tersebut tidak termasuk Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Kolom 6	:	Cukup jelas
Kolom 7 s.d. 15	:	Diisi dengan prognosis pencairan piutang pajak pada setiap bulan
Kolom 16	:	Diisi dengan total prognosis pencairan piutang dari bulan April s.d. Desember 2012 (penjumlahan kolom 7 s.d. 15)
Kolom 17	:	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan untuk menjelaskan isian di kolom sebelumnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

LAMPIRAN V
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

RENCANA KEGIATAN PENAGIHAN
TAHUN 2012

(dalam rupiah penuh)

Kode KPP	KPP	Target Pencairan Piutang Pajak Tahun 2012	Rencana Kegiatan Penagihan														Jumlah Pencairan	Keterangan
			Pelaksanaan Surat Teguran		Pelaksanaan Surat Paksa		Pelaksanaan SPMP		Pelaksanaan Lelang		Pemblokiran Rekening		Pencegahan PP Ke Luar Negeri		Penyanderaan			
			Jumlah Surat Teguran	Pencairan Piutang	Jumlah Surat Paksa	Pencairan Piutang	Jumlah SPMP	Pencairan Piutang	Jumlah Lelang	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)

Jumlah Jurusita Pajak sampai dengan awal tahun 2012 : ..... orang 3)

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
3)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Diisi dengan target pencairan piutang masing-masing KPP
Kolom 4	:	Diisi dengan jumlah fisik Surat Teguran yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 5	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya Surat Teguran tahun 2012
Kolom 6	:	Diisi dengan jumlah fisik Surat Paksa yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 7	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya Surat Paksa tahun 2012
Kolom 8	:	Diisi dengan jumlah SPMP yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 9	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya SPMP tahun 2012
Kolom 10	:	Diisi dengan jumlah pelaksanaan lelang yang direncanakan dilakukan pada tahun 2012
Kolom 11	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan lelang tahun 2012
Kolom 12	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan pemblokiran tahun 2012
Kolom 13	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan pemblokiran tahun 2012
Kolom 14	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri tahun 2012
Kolom 15	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak berpergian ke luar negeri tahun 2012
Kolom 16	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan penyanderaan tahun 2012
Kolom 17	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak tahun 2012
Kolom 18	:	Diisi dengan jumlah seluruh pencairan piutang yang diharapkan akibat tindakan penagihan tahun 2012 yang merupakan penjumlahan kolom (5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)+(17)
Kolom 19	:	Diisi dengan keterangan untuk menjelaskan lebih rinci kolom-kolom sebelumnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)

LAMPIRAN VI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

PROGNOSIS PENCAIRAN PIUTANG PAJAK
TAHUN 2012

Kode KPP	Nama KPP	Target Pencairan Per KPP	Pencairan Piutang Bulan Januari s.d. Maret 2012	Prognosa											Total	Keterangan
				Nama Wajib Pajak	NPWP/NOP	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
A. Wajib Pajak Penunggak Pajak 100 Besar																
B. Selain Wajib Pajak/Penunggak Pajak 100 Besar																

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian

1)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Diisi dengan target pencairan piutang masing-masing KPP
Kolom 4		
Poin A	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak bulan Januari s.d. Maret 2012 dari Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan dan WP tersebut merupakan Penunggak Pajak 100 Besar di KPP
Poin B	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak bulan Januari s.d. Maret 2012 dari Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan tetapi WP tersebut tidak termasuk Penunggak Pajak 100 Besar di KPP
Kolom 5		
Poin A	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan dan WP tersebut merupakan Penunggak Pajak 100 Besar di KPP
Poin B	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang masuk prognosis pencairan tetapi WP tersebut tidak termasuk Penunggak Pajak 100 Besar di KPP
Kolom 6	:	Cukup jelas
Kolom 7 s.d. 15	:	Diisi dengan prognosis pencairan piutang pajak pada setiap bulan
Kolom 16	:	Diisi dengan total prognosis pencairan piutang dari bulan April s.d. Desember 2012 (penjumlahan kolom 7 s.d. 15)
Kolom 17	:	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan untuk menjelaskan isian di kolom sebelumnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)

LAMPIRAN VII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

RENCANA KEGIATAN PENAGIHAN
TAHUN 2012

(dalam rupiah penuh)

Kode KPP	KPP	Target Pencairan Piutang Pajak Tahun 2012	Rencana Kegiatan Penagihan														Jumlah Perkiraan Pencairan	Keterangan
			Pelaksanaan Surat Teguran		Pelaksanaan Surat Paksa		Pelaksanaan SPMP		Pelaksanaan Lelang		Pemblokiran Rekening		Pencegahan PP Ke Luar Negeri		Penyanderaan			
			Jumlah Surat Teguran	Pencairan Piutang	Jumlah Surat Paksa	Pencairan Piutang	Jumlah SPMP	Pencairan Piutang	Jumlah Lelang	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang	Jumlah WP/PP	Pencairan Piutang		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Jumlah																		

Jumlah Jurusita Pajak sampai dengan awal tahun 2012 : ..... orang 2)

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

(1)	:	Cukup jelas
(2)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Diisi dengan target pencairan piutang masing-masing KPP
Kolom 4	:	Diisi dengan jumlah fisik Surat Teguran yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 5	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya Surat Teguran tahun 2012
Kolom 6	:	Diisi dengan jumlah fisik Surat Paksa yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 7	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya Surat Paksa tahun 2012
Kolom 8	:	Diisi dengan jumlah SPMP yang akan diterbitkan tahun 2012
Kolom 9	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat diterbitkannya SPMP tahun 2012
Kolom 10	:	Diisi dengan jumlah pelaksanaan lelang yang direncanakan dilakukan pada tahun 2012
Kolom 11	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan lelang tahun 2012
Kolom 12	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan pemblokiran tahun 2012
Kolom 13	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan pemblokiran tahun 2012
Kolom 14	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan pencegahan berpergian ke luar negeri tahun 2012
Kolom 15	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak bepergian ke luar negeri tahun 2012
Kolom 16	:	Diisi dengan jumlah Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan dilakukan tindakan penyanderaan tahun 2012
Kolom 17	:	Diisi dengan pencairan piutang yang diharapkan akibat pelaksanaan penyanderaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak tahun 2012
Kolom 18	:	Diisi dengan jumlah seluruh pencairan piutang yang diharapkan akibat tindakan penagihan tahun 2012 yang merupakan penjumlahan kolom (5)+(7)+(9)+(11)+(13)+(15)+(17)
Kolom 19	:	Diisi dengan keterangan untuk menjelaskan lebih rinci kolom-kolom sebelumnya

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

LAMPIRAN VIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

LAPORAN REALISASI PROGNOSIS PENCAIRAN PIUTANG PAJAK
BULAN .....3) TAHUN 2012

(dalam rupiah penuh)

No	Nama Wajib Pajak	NPWP/NOP	Prognosa	Tindakan Penagihan Yang Sudah Dilakukan						Realisasi	Selisih	Keterangan
				ST	SP	SPMP	Blokir	Lelang	Cegah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)= (4)-(11)	(13)
A. Wajib Pajak Penunggak Pajak 100 Besar												
B. Selain Wajib Pajak/Penunggak Pajak 100 Besar												
Jumlah												

Kepala Kantor,

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Diisi dengan bulan laporan
3)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2		
Poin A	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang terdapat dalam prognosa pencairan piutang pajak dan termasuk Wajib Pajak Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Poin B	:	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang terdapat dalam prognosa pencairan piutang pajak tetapi tidak termasuk Wajib Pajak Penunggak Pajak 100 Besar KPP
Kolom 3	:	Cukup jelas
Kolom 4	:	Diisi dengan nilai prognosa bulan pelaporan dan sisa prognosa bulan sebelumnya apabila tidak tercapai seluruhnya
Kolom 5	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum sampai pada tahap penerbitan Surat Teguran
Kolom 6	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum sampai pada tahap pemberitahuan Surat Paksa
Kolom 7	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum sampai pada tahap Penyitaan
Kolom 8	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum sampai pada tahap Pemblokiran Rekening
Kolom 9	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum sampai pada tahap Pelelangan
Kolom 10	:	Diisi dengan tanda centang (v) apabila sudah dan silang (x) apabila belum dilakukan tindakan pencegahan Wajib Pajak/Penanggung Pajak
Kolom 11	:	Diisi dengan nilai realisasi pencairan prognosa pada bulan pelaporan
Kolom 12	:	Diisi dengan selisih nilai prognosa dibandingkan dengan nilai realisasi prognosa pada bulan pelaporan dan jika belum lunas akan ditambahkan ke prognosa bulan selanjutnya
Kolom 13	:	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan, misalnya mengenai kondisi wajib pajak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penagihan

LAMPIRAN IX
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....

PROFIL WAJIB PAJAK

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK
1. Nama Wajib Pajak : .....
2. NPWP : .....
3. Alamat : .....
4. Nomor Telepon : .....

B. PENANGGUNG PAJAK
1. Daftar Pemegang Saham

Nama/NPWP	Alamat	Kepemilikan Saham		
		Jumlah Saham	Nilai	%

2. Dewan Direksi

Nama/NPWP	Jabatan	Alamat

3. Dewan Komisaris

Nama/NPWP	Jabatan	Alamat

4. Pengurus Lain (yang tidak tercantum dalam akte pendirian maupun akte perubahan)
Yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya.

Nama/NPWP	Jabatan/Wewenang	Alamat

5. Kuasa/Kurator/Likuidator

Nama/NPWP	Alamat	Keterangan

C. RINCIAN TUNGGAKAN

No.	SKPKB/SKPKBT/STP/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan PK		Nilai Piutang Pajak	Umur Piutang Pajak	Kualitas Piutang Pajak
	Nomor	Tanggal			
Jumlah					

Peringkat nilai piutang pajak pada KPP : .....

D. UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN

No.	SKPKB/SKPKBT/STP/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK		Nilai Piutang Pajak	Upaya Hukum		Keputusan/Putusan	
	Nomor	Tanggal		Tanggal	Jenis Upaya	Tanggal	Isi
Jumlah							

E. TINDAKAN PENAGIHAN YANG TELAH DILAKUKAN
1. PENAGIHAN PERSUASIF EDUKATIF

Surat Panggilan			Pertemuan dengan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak	
Nomor	Tanggal	Hasil	Tanggal	Hasil

2. PENAGIHAN AKTIF REPRESIF

SKPKB/SKPKBT/STP/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK	Surat Teguran		Surat Paksa		Tindakan Penagihan Lain
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	

F. KENDALA DALAM PELAKSANAAN PENAGIHAN

.....

G. ANALISIS ATAS TINGKAT KETERTAGIHAN DAN KEMAMPUAN MEMBAYAR

1. Riwayat Pelaporan SPT

   .....

2. Riwayat Pembayaran

   .....

3. Riwayat Pemeriksaan

   .....

4. Kondisi Usaha Wajib Pajak

   .....

5. Status/Kondisi Penanggung Pajak

   .....

6. Keberadaan dan nilai aset Wajib Pajak

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Dokumen/Bukti Kepemilikan		Keterangan
				Jenis	Status (Diagunkan/Tidak)	

7. Keberadaan dan nilai aset Penanggung Pajak

No	Jenis Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Dokumen/Bukti Kepemilikan		Keterangan
				Jenis	Status (Diagunkan/Tidak)	

H. LAIN-LAIN (terlampir)

1. Dokumentasi atas tindakan penagihan yang telah dilakukan, contoh foto situasi pada saat memberitahukan Surat Paksa, foto situasi pada saat melakukan penyitaan, foto aset yang disita.
2. Hasil konfirmasi kebenaran data aset kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak atau pihat terkait.
3. *Printout* data dan informasi tentang Wajib Pajak/Penanggung Pajak dari media cetak/ *online*/elektronik dan media lainnya.
4. Hasil koordinasi antarseksi di KPP.
5. Data dan informasi dari pihak ketiga.

I. SARAN DAN MASUKAN BERKAITAN DENGAN MASALAH WAJIB PAJAK

.....

.....

....., ...

Kepala Seksi Penagihan

.....

NIP .....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)
KANTOR PELAYANAN PAJAK .....2)

LAMPIRAN X
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KERTAS KERJA MONITORING PIUTANG PAJAK YANG AKAN DALUWARSA
TAHUN 2012

No.	Nama Wajib Pajak	NPWP	Jenis Pajak	Tahun Pajak	SKPKB/SKPKBT/STP/SK Pembetulan/SK Keberatan/ Putusan Banding/Putusan PK		Nilai Piutang Pajak	Tindakan Penagihan Terakhir		Dokumen Dasar Penghitungan Daluwarsa		Tanggal Daluwarsa Penagihan	Pencairan Piutang Pajak	
					Nomor	Tanggal		Nomor	Tanggal	Jenis	Tanggal		Semester I	Semester II
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL														

....., ...
Kepala Seksi Penagihan

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Cukup jelas
Kolom 4	:	Cukup jelas
Kolom 5	:	Cukup jelas
Kolom 6	:	Cukup jelas
Kolom 7	:	Cukup jelas
Kolom 8	:	Cukup jelas
Kolom 9	:	Diisi dengan nomor dokumen tindakan penagihan terakhir
Kolom 10	:	Diisi dengan tanggal tindakan penagihan terakhir. Dalam hal tindakan penagihan terakhirnya adalah Surat Paksa, diisi dengan tanggal penyampaian Surat Paksa.
Kolom 11	:	Diisi dengan nama jenis dokumen yang menjadi dasar perhitungan daluwarsa yaitu : a. STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/SK Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali b. Surat Paksa c. Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan Pembayaran d. Pembayaran (SSP, MPN, Pbk)
Kolom 12	:	Diisi dengan tanggal awal untuk menghitung periode daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan dengan mengacu kepada hal-hal yang dapat mengakibatkan tertangguhnya daluwarsa penagihan sebagaimana diuraikan pada angka 11
Kolom 13	:	Diisi dengan tanggal jatuh tempo daluwarsa sesuai dengan ketentuan perpajakan berlaku yang dihitung dari tanggal awal penentuan daluwarsa sebagaimana dimaksud pada angka 12
Kolom 14	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak pada semester I tahun 2012
Kolom 15	:	Diisi dengan jumlah pencairan piutang pajak pada semester II tahun 2012

LAMPIRAN XI
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)

PROGRAM MONITORING DAN BIMBINGAN KEGIATAN PENAGIHAN
TAHUN 2012

No.	Program Kegiatan dan Bimbingan Kegiatan Penagihan	Rencana				Realisasi			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Reviu atas Kertas Kerja Penagihan (KPP) yang dibuat oleh KPP								
2.	Bedah Profil Wajib Pajak								
3.	Pendampingan KPP								
4.	Lain-Lain								
	a.								
	b.								
	c.								
	d. dst.								

....., ...2)
Kepala Seksi Bimbingan Penagihan

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Diisi dengan tanggal disusunnya program monitoring dan bimbingan kegiatan penagihan
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Diisi dengan jenis program monitoring dan bimbingan kegiatan penagihan
Kolom 3 s.d. 6	:	Diisi dengan tanda "v" pada kolom kapan program monitoring dan bimbingan kegiatan penagihan direncanakan untuk dilaksanakan
Kolom 7 s.d. 10	:	Diisi dengan tanggal pelaksanaan program monitoring dan kegiatan penagihan

LAMPIRAN XII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)

KERTAS KERJA REVIU
PER TANGGAL .....2)

Nama KPP : ..... 3)

No	Uraian Reviu	Ada	Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak[4)] .... Kesimpulan :		
2	Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak[5)] .... Kesimpulan :		
3	Prognosis Pencairan Piutang Pajak[6)] .... Kesimpulan :		
4	Rencana Kegiatan Penagihan[7)] .... Kesimpulan :		
5	Laporan Realisasi Pencairan Prognosis Piutang Pajak Piutang Pajak[8)] .... Kesimpulan :		
6	Kertas Kerja Monitoring Piutang Pajak yang Akan Daluwarsa[9)] .... Kesimpulan :		

....., ...
Kepala Seksi Bimbingan Penagihan

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian :

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
3)	:	Diisi dengan nama KPP yang direviu
4)	:	Diisi dengan kesesuaian antara hasil analisis dengan parameter yang ada
5)	:	Diisi dengan kesesuaian antara daftar urutan dengan analisis risiko
6)	:	Diisi dengan kesesuaian antara prognosis dengan Daftar Prioritas dan KKARKPP
7)	:	Diisi dengan kesesuaian antara rencana kerja dengan kemungkinan tertagihnya piutang pajak berdasarkan analisis risiko
8)	:	Diisi dengan kendala-kendala yang menyebabkan realisasi pencairan piutang pajak tidak sesuai dengan prognosis
9)	:	Diisi dengan kondisi atas piutang pajak yang akan daluwarsa
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Dibubuhi tanda "v" apabila terdapat dokumen sebagaimana dimaksud dalam kolom 2
Kolom 4	:	Dibubuhi tanda "v" apabila tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud dalam kolom 2

LAMPIRAN XIII
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

BERITA ACARA REVIU
KERTAS KERJA PENAGIHAN

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE- /PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak, pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... bertempat di ....., telah dilaksanakan reviu oleh Kepala Seksi Bimbingan Penagihan Kanwil DJP ..... atas kelengkapan dan kesesuaian Kertas Kerja Penagihan KPP ..... yang meliputi dokumen-dokumen sebagai berikut :

1. Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak (KKARKPP);
2. Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak (DPTPP);
3. Prognosis Pencairan Piutang Pajak;
4. Rencana Kegiatan Penagihan;
5. Laporan Realisasi Prognosis Pencairan Piutang Pajak;
6. Kertas Kerja Monitoring Piutang Pajak yang Akan Daluwarsa.

Hasil reviu adalah sebagaimana tertuang dalam Kertas Kerja Reviu yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Kantor Wilayah DJP	Kantor Pelayanan Pajak .....
Kepala Seksi Bimbingan Penagihan	Kepala Seksi Penagihan
.....	.....
NIP	NIP .....

LAMPIRAN XIV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP .....1)

DAFTAR 100 PRIORITAS TINDAKAN PENAGIHAN PAJAK
PER TANGGAL .....2)

No.	KPP	Nama Wajib Pajak	NPWP	Nilai Piutang Pajak (Rp)	Skor	Prioritas	Daluwarsa di Tahun Berjalan (Ya/Tidak)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1							
2							
3							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
98							
99							
100							

....., ...
Kepala Seksi Bimbingan Penagihan

.....
NIP .....

Petunjuk Pengisian

1)	:	Cukup jelas
2)	:	Cukup jelas
Kolom 1	:	Cukup jelas
Kolom 2	:	Cukup jelas
Kolom 3	:	Cukup jelas
Kolom 4	:	Cukup jelas
Kolom 5	:	Diisi dengan nilai piutang pajak
Kolom 6	:	Diisi dengan total skor berdasarkan Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak (KKARKPP)
Kolom 7	:	Diisi dengan kelompok Wajib Pajak berdasarkan prioritas (I / II / III)
Kolom 8	:	Diisi dengan keterangan apakah terdapat piutang pajak yang akan daluwarsa di tahun berjalan (ya / tidak)

LAMPIRAN XV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-29/PJ/2012
Tanggal : 11 Mei 2012

(LEMBAR PERTAMA)
BERITA ACARA SERAH TERIMA KERTAS KERJA PENAGIHAN
KPP .....

Yang bertanda tangan di bawah ini

I. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Seksi Penagihan KPP ..... masa jabatan mulai tanggal ..... sesuai SK Mutasi nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Seksi Penagihan KPP ..... masa jabatan mulai tanggal ..... sesuai SK Mutasi nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berkas Kertas Kerja Penagihan KPP ..... yang terdiri dari :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan*	
		Ada	Tidak
1.	Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak (KKARKPP)		
2.	Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak (DPTPP)		
3.	Prognosis Pencairan Piutang Pajak		
4.	Rencana Kegiatan Penagihan		
5.	Laporan Realisasi Prognosis Pencairan Piutang Pajak		
6.	Kertas Kerja Monitoring Piutang Pajak yang Akan Daluwarsa		

Berita Acara Serah Terima Kertas Kerja Penagihan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di :
Pada tanggal :

PIHAK KEDUA

.....
NIP. .....

PIHAK PERTAMA

.....
NIP. .....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....
NIP .....

*diisi dengan tanda "v" pada kolom yang sesuai

(LEMBAR KEDUA)
BERITA ACARA SERAH TERIMA KERTAS KERJA PENAGIHAN
KPP .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Seksi Penagihan KPP ..... masa jabatan mulai tanggal ..... sesuai SK Mutasi nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. Nama : .....
NIP : .....
Jabatan : .....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Seksi Penagihan KPP ..... masa jabatan mulai tanggal ..... sesuai SK Mutasi nomor ....., selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berkas Kertas Kerja Penagihan KPP ..... yang terdiri dari :

No.	Jenis Dokumen	Keterangan*	
		Ada	Tidak
1.	Kertas Kerja Analisis Risiko Ketidaktertagihan Piutang Pajak (KKARKPP)		
2.	Daftar Prioritas Tindakan Penagihan Pajak (DPTPP)		
3.	Prognosis Pencairan Piutang Pajak		
4.	Rencana Kegiatan Penagihan		
5.	Laporan Realisasi Prognosis Pencairan Piutang Pajak		
6.	Kertas Kerja Monitoring Piutang Pajak yang Akan Daluwarsa		

Berita Acara Serah Terima Kertas Kerja Penagihan ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditandatangani di :
Pada tanggal :

PIHAK KEDUA

.....
NIP. .....

PIHAK PERTAMA

.....
NIP. .....

Mengetahui
Kepala Kantor

.....
NIP .....

*diisi dengan tanda "v" pada kolom yang sesuai